

## Imigrasi Baubau Amankan Lima WN Vietnam Diduga Terlibat Jaringan Migrasi Ilegal ke Australia



Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau mengamankan lima warga negara asing (WNA) asal Vietnam yang diduga hendak melanjutkan perjalanan ke Australia

**Laporan: Prasetyo M, Baubau Post-Durasi Times**

BAUBAU, Upaya dugaan penyelundupan manusia melalui jalur ilegal kembali terungkap. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau mengamankan lima warga negara asing (WNA) asal Vietnam yang diduga hendak melanjutkan perjalanan ke Australia secara ilegal dengan memanfaatkan Indonesia sebagai negara transit.

Kelima WNA tersebut saat ini tengah menunggu proses deportasi ke negara asalnya. Pemulangan dijadwalkan berlangsung pada Rabu (15/4/2026)

Lanjut ke Hal: 7

## Sinergi OPD Diperkuat, BPS Buton Selatan Siap Gelar Sensus Ekonomi 2026



**Laporan: Firman**

BUTON SELATAN, BP -Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton Selatan (Busel) terus mematangkan persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Hal tersebut merupakan salah satu langkah yang dilakukan BPS yakni melakukan koordinasi dan sosialisasi di lingkup Pemerintah daerah (Pemda) Busel.

Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah, mulai dari Sekretariat Daerah, Bappeda, hingga Dinas Perdagangan. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektoral men-

jelang pendataan lapangan yang dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026 mendatang.

Ketua Pelaksana SE2026 Kabupaten Buton Selatan, Wiwi Siu Kaimudin, SE., M.Si., menegaskan, bahwa dukungan seluruh pihak sangat dibutuhkan demi kesuksesan agenda nasional tersebut.

“Berdasarkan Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, Sensus Ekonomi merupakan kegiatan strategis yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memotret struktur ekonomi daerah. Karena itu, kami men-

gajak seluruh perangkat daerah untuk turut mengawal pelaksanaannya,” ujar Wiwi pada awak media, Sabtu (11/4/2026).

Ia menambahkan, hasil Sensus Ekonomi menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Garda SE2026, Dhea Prawidia, S.Tr.Stat, menjelaskan adanya penyesuaian jadwal pelaksanaan menjadi Mei hingga Agustus 2026. Menurutnya, penambahan

Lanjut ke Hal: 7

## Sinergi Pemerintah dan Petani Sukseskan Panen Padi di Wawoangi Sekaligus Perkuat Ketahanan Pangan Buton Selatan



Panen padi ladang di Desa Wawoangi, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, mencatat produktivitas sebesar 2,68 ton per hektare pada Senin (13/4/2026).

**Laporan: Ardi**

BUTON SELATAN, BP-Panen padi ladang di Desa Wawoangi, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, mencatat produktivitas sebesar 2,68 ton per hektare pada Senin (13/4/2026). Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan program bantuan benih dan pendampingan penuliharaan pertanian yang digulirkan pemerintah daerah.

Kegiatan panen yang berlangsung di kawasan HKN Sangia Rauro ini berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Selain panen

simbolis, rombongan juga melakukan peninjauan langsung ke lahan pertanian yang menjadi lokasi pengembangan padi ladang.

Panen ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pemberdayaan petani lokal di wilayah Sampolawa. Program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan keberlanjutan produksi pertanian di daerah.

Realisasi tanam padi gogo dalam program ini mencapai total 40 hektare, yang terdiri atas 19 hektare di Desa Wawoangi, 3 hektare di Katilombu,

serta 18 hektare menggunakan bibit lokal hasil pengembangan petani.

Camat Sampolawa La Ode Rahmat, S.Sos., menegaskan bahwa capaian panen ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. “Panen ini menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah, penyuluh, dan petani mampu meningkatkan produksi secara nyata,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi petani untuk terus mengembangkan usaha tani secara berkelanjutan.

Lanjut ke Hal: 7

## IDI Baubau Periode 2025-2028 Resmi Dilantik, BHD Jadi Pilar Edukasi Kegawatdaruratan, Pemkot Dorong RSUD Naik Kelas dan Modern



engurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Baubau periode 2025-2028 resmi dilantik pada Minggu (12/4/2025)

**Laporan: Prasetyo M**

BAUBAU, BP-Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Baubau periode 2025-2028 resmi dilantik pada Minggu (12/4/2025) dengan komitmen memperkuat layanan kesehatan, meningkatkan kapasitas tenaga medis, serta memperluas edukasi kegawatdaruratan kepada masyarakat.

Pelantikan yang dipimpin Ketua Wilayah IDI Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Rabiul Awal, itu dirangkaikan dengan Workshop Bantuan Hidup Dasar (BHD) sebagai langkah awal memperkuat kesiapsiagaan medis di tingkat masyarakat.

Ketua IDI Kota Baubau periode 2025-2028, Hasrida Hamid, menegaskan bahwa kepengurusan

baru akan fokus pada peningkatan profesionalisme dokter serta penguatan sistem rujukan kesehatan di daerah.

“Pelantikan ini menjadi momentum strategis untuk menghadirkan kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan solutif dalam menjawab tantangan kesehatan,” ujar Hasrida.

Ia menjelaskan, pen-

Lanjut ke Hal: 7

## Imigrasi Baubau Amankan Lima WN Vietnam Diduga Terlibat Jaringan Migrasi Ilegal ke Australia

melalui Bandara Betoambari Baubau menuju Bandara Ngurah Rai Bali sebelum diterbangkan ke Vietnam.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau Muhammad Bakri mengatakan tindakan deportasi diambil karena para WNA tersebut terbukti menyalahgunakan izin tinggal kunjungan serta tidak dapat menjelaskan tujuan keberadaan mereka di Indonesia secara sah.

“Kami menegakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Muhammad Bakri dalam konferensi pers, Selasa (14/4/2026).

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai keberadaan sejumlah orang asing dengan perilaku mencurigakan di sebuah hotel di kawasan Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian melakukan pengawasan dan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan kelima WNA itu pada Senin, 6 April 2026, saat berada di Hotel Calista.

Dari hasil pemerik-

saan, diketahui kelima WNA tersebut terdiri atas empat laki-laki dan satu perempuan yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 31 Maret 2026 menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan.

Dalam pemeriksaan lebih lanjut, salah seorang WNA berinisial NNL mengaku perjalanan mereka difasilitasi oleh seorang pria asal Indonesia yang menjanjikan keberangkatan menuju Australia melalui jalur ilegal.

“Kami datang ke Indonesia untuk melanjutkan perjalanan ke Australia, dan semua sudah diatur oleh seseorang,” ujar NNL kepada petugas, sebagaimana disampaikan pihak imigrasi.

Petugas menduga kuat keberadaan mereka merupakan bagian dari skema terorganisir yang berkaitan dengan jaringan penyelundupan manusia lintas negara.

Indikasi tersebut diperkuat oleh temuan di lapangan, di antaranya para WNA tidak memiliki aktivitas jelas, tidak memiliki penjamin, serta tidak mampu menunjukkan rencana perjalanan yang sah selama berada di Indonesia.

“Kondisi ini menunjukkan adanya pola pengaturan yang

tidak wajar, termasuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari oleh pihak lain,” kata Muhammad Bakri.

Selain itu, pola hunian mereka juga dinilai mencurigakan, di mana empat laki-laki menempati satu kamar berbiaya murah secara bersama-sama, sementara satu perempuan berada di kamar terpisah.

Fenomena ini, menurut pihak imigrasi, sejalan dengan modus yang kerap digunakan dalam praktik penyelundupan manusia, yakni mengumpulkan calon migran ilegal di titik transit sebelum diberangkatkan secara bertahap.

Secara historis, Indonesia memang kerap menjadi negara transit dalam arus migrasi ilegal menuju Australia, terutama sejak meningkatnya kebijakan pengetatan visa oleh Pemerintah Australia pada awal 2000-an.

Data internasional menunjukkan bahwa rute Asia Tenggara, termasuk Indonesia, telah lama dimanfaatkan oleh jaringan penyelundupan manusia untuk mengirim migran dari negara seperti Vietnam, Afghanistan, dan Myanmar menuju Australia melalui jalur laut.

Di tingkat nasional, aparat penegak hukum Indonesia

bersama lembaga internasional seperti International Organization for Migration (IOM) telah berulang kali mengungkap kasus serupa, khususnya di wilayah perbatasan dan kota-kota pesisir.

Muhammad Bakri menilai, sulitnya memperoleh visa resmi ke Australia menjadi salah satu faktor pendorong para WNA memilih jalur ilegal meskipun berisiko tinggi.

“Kami mengimbau agar warga negara asing mematuhi aturan keimigrasian dan tidak tergiur tawaran jalur ilegal yang melanggar hukum,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi peran masyarakat dan pihak pengelola penginapan yang telah memberikan informasi awal kepada petugas sehingga kasus ini dapat diungkap.

“Sinergi antara masyarakat dan aparat menjadi kunci dalam pengawasan orang asing di daerah,” kata Bakri.

Pihak Imigrasi Baubau menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan orang asing guna mencegah praktik penyelundupan manusia yang merugikan negara serta membahayakan keselamatan individu yang terlibat. (\*)

## IDI Baubau Periode 2025-2028 Resmi Dilantik, BHD Jadi Pilar Edukasi Kegawatdaruratan, Pemkot Dorong RSUD Naik Kelas dan Modern

kuat kapasitas tenaga medis melalui pelatihan seperti BHD merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh.

Menurutnya, edukasi kepada masyarakat terkait penanganan kegawatdaruratan sangat penting agar pertolongan pertama dapat dilakukan sebelum pasien tiba di fasilitas kesehatan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Baubau, Wa Ode Hamsinah Bolu, menekankan pentingnya peran IDI sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan sektor kesehatan.

“Kita telah mencapai banyak kemajuan di bidang kesehatan, dan itu tidak terlepas dari kontribusi IDI sebagai organisasi profesi,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Baubau telah melampaui angka 80, menjadikannya salah satu daerah dengan capaian terbaik di Sulawesi Tenggara.

Meski demikian, Hamsinah mengakui masih terdapat tantangan, salah satunya peningkatan status RSUD Baubau yang saat ini masih bertipe D.

“Pemerintah daerah sedang berupaya menghadirkan rumah

sakit yang lebih lengkap dan modern, baik dari sisi fasilitas maupun tenaga medis,” katanya.

Saat ini, RSUD Baubau telah menjadi rumah sakit rujukan kedua di wilayah Sulawesi Tenggara, sementara peningkatan sarana dan prasarana juga dilakukan pada tujuh puskesmas di kota tersebut.

Di bidang kesehatan masyarakat, Pemerintah Kota Baubau juga mencatat capaian dalam penurunan stunting dengan memperoleh dana insentif sebesar Rp3 miliar dari pemerintah pusat.

Ketua IDI Sultra, La Ode Rabiul Awal, menilai pelaksanaan Workshop BHD menunjukkan peran IDI tidak hanya sebagai organisasi profesi, tetapi juga sebagai edukator masyarakat.

“Dengan edukasi ini, masyarakat diharapkan mampu memberikan pertolongan pertama sebelum pasien sampai di rumah sakit,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan para dokter untuk tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.

“Jika kita bekerja dengan baik dan berpihak pada kemanusiaan, maka kepercayaan masyarakat akan terus mening-

kat,” tambahnya.

Secara historis, Ikatan Dokter Indonesia didirikan pada tahun 1950 sebagai wadah profesional dokter di Indonesia yang berperan dalam menjaga standar etika dan mutu pelayanan medis. Dalam perkembangannya, organisasi ini menjadi salah satu pilar penting dalam sistem kesehatan nasional.

Di tingkat global, konsep Bantuan Hidup Dasar (BHD) berkembang dari praktik resusitasi modern yang dipopulerkan sejak 1960-an oleh komunitas medis internasional, termasuk melalui pedoman dari American Heart Association yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam penanganan kegawatdaruratan.

Pelantikan pengurus IDI Baubau ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara tenaga medis dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kondisi darurat.

Dengan langkah tersebut, IDI Baubau diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mendukung pembangunan kesehatan yang berkelanjutan di daerah. (\*)

## Sinergi OPD Diperkuat, BPS Buton Selatan Siap Gelar Sensus Ekonomi 2026

waktu ini dilakukan agar pendataan dapat menjangkau seluruh pelaku usaha secara lebih komprehensif.

“Perpanjangan waktu ini bertujuan untuk memastikan seluruh lapangan usaha dapat terdapat dengan baik, sehingga gambaran struktur perekonomian yang

dihasilkan benar-benar utuh,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan, SE2026 akan mengusung sejumlah inovasi, di antaranya pendataan menyeluruh terhadap seluruh skala usaha, termasuk sektor ekonomi digital dan kreatif yang terus berkembang. Selain itu, metode pendata-

an door to door tetap digunakan guna memastikan akurasi data sekaligus memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Melalui kegiatan sosialisasi ini, BPS berharap terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat,” tuturnya.

“Data yang dihasilkan dari SE2026 diharapkan mampu menjadi fondasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton Selatan,” sambungnya. (\*)

## Sinergi Pemerintah dan Petani Sukseskan Panen Padi di Wawoangi Sekaligus Perkuat Ketahanan Pangan Buton Selatan

tan. “Kami berharap petani semakin percaya diri mengelola lahan dan meningkatkan produktivitasnya,” katanya.

Koordinator Pen-

camatan Sampolawa, Muhammad Amir, yang mewakili Kepala Bidang Pangan La Mini, menyebut pendampingan teknis menjadi faktor penting dalam pening-

katan hasil panen. “Pendekatan penyuluhan yang intensif membantu petani dalam memilih benih dan pola tanam yang tepat,” ucapnya.

Sementara itu,

Kepala UPTD KPH La Kompa Agung S. Kusomo, S.Hut., menilai kegiatan tersebut juga memperkuat kolaborasi lintas sektor. “Kegiatan ini bukan sekadar panen, teta-

pi juga momentum pemererat kerja sama antarinstansi,” katanya.

Kegiatan panen turut dihadiri unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat petani setempat. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan dukungan kolektif terhadap pengembangan sektor pertanian di daerah.

Secara historis, pengembangan padi ladang atau padi gogo telah lama menjadi bagian dari sistem pertanian tradisional di Indonesia, terutama di wilayah luar Jawa. Pada era 1970-an hingga 1980-an, pemerintah melalui program intensifikasi pertanian mulai mendorong diversifikasi tanaman pangan un-

tuk mengurangi ketergantungan pada beras sawah.

Di tingkat global, Food and Agriculture Organization mencatat bahwa padi ladang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan di kawasan tropis, khususnya pada wilayah dengan keterbatasan irigasi. Sistem ini dinilai adaptif terhadap perubahan iklim dan kondisi lahan marginal.

Mengacu pada pengalaman tersebut, pemerintah daerah terus mendorong pemanfaatan lahan potensial seperti di HKN Sangia Rauro yang memiliki luas sekitar 251 hektare, dengan 40 hektare di antaranya telah dimanfaatkan untuk budidaya padi.

Dengan capaian

produktivitas saat ini, pemerintah optimistis sektor pertanian di Buton Selatan dapat berkembang lebih pesat. Selain meningkatkan kesejahteraan petani, langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

“Ke depan, kami akan terus meningkatkan dukungan, baik dari sisi benih, teknologi, maupun pendampingan,” kata salah satu perwakilan pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan panen ini pun menjadi simbol optimisme baru bagi petani di Sampolawa untuk terus berinovasi dan menjaga keberlanjutan produksi pangan di tengah berbagai tantangan. (\*)

## Kader PPP Baubau Kembali Pilih H Yusran Fahim, Fokus Tambah Kursi DPRD, Siap Menang 2029



artai Persatuan Pembangunan (PPP) menargetkan peningkatan signifikan jumlah kursi legislatif di wilayah Buton Raya pada pemilu mendatang

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menargetkan peningkatan signifikan jumlah kursi legislatif di wilayah Buton Raya pada pemilu mendatang. Target tersebut mengemuka dalam Musyawarah Cabang Bersama (Muscaber) IX PPP yang digelar di Ballroom Villa Nirwana Beach, Kota Baubau, Minggu (12/04/2026).

Kegiatan yang dihadiri kader dari Kota Baubau, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Buton Tengah itu menjadi ajang konsolidasi penting bagi partai berlambang Ka'bah tersebut. Muscaber dibuka langsung oleh Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kota Baubau.

Dalam arahannya, Yusran menegaskan bahwa PPP harus mampu merumuskan strategi politik yang berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat. "Strategi kita ke depan harus membumi, lahir dari kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar konsep di atas kertas," ujarnya.

Ia menambahkan, upaya peningkatan kursi DPRD hanya dapat dicapai melalui kerja kolektif dan konsolidasi yang solid di semua tingkatan partai. Oleh karena itu, seluruh kader diminta memperkuat jaringan dan komunikasi politik hingga ke akar rumput.

Menurut Yusran, Muscaber bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momen penting untuk mengevaluasi capaian dan menyusun langkah strategis ke depan. "Ini bukan kegiatan seremonial, tetapi momentum sakral kebangkitan PPP di jazirah Buton," katanya.

Ia juga menyoroti perlunya introspeksi menyeluruh terhadap hasil pemilu sebelumnya yang dinilai belum maksimal. Evaluasi tersebut, lanjutnya, harus menjadi dasar untuk memperbaiki kinerja partai secara menyeluruh.

"Mari kita jadikan kekurangan sebagai bahan bakar untuk melompat lebih tinggi. Dengan kepemimpinan kuat dan kekompakan kader, kita bisa sampai pada kemenangan," ucap Yusran di hadapan ratusan

peserta.

Lebih lanjut, Yusran mengatakan pentingnya soliditas internal sebagaimana ditekankan oleh Ketua Umum DPP PPP, Muhammad Mardiono. Ia menyebut persatuan kader sebagai kunci utama untuk mengembalikan kejayaan PPP di tingkat nasional.

"Kunci kita satu, soliditas. Jika kita bersatu dan bergerak bersama, PPP akan kembali berjaya pada 2029," tegasnya.

Secara historis, PPP merupakan salah satu partai politik tertua di Indonesia yang berdiri pada 1973 melalui fusi beberapa partai Islam. Dalam perjalanan politik nasional, PPP pernah menjadi kekuatan utama di parlemen, khususnya pada era Orde Baru hingga awal reformasi.

Namun, dalam beberapa pemilu terakhir, perolehan suara PPP cenderung mengalami fluktuasi. Pada Pemilu 2019 misalnya, PPP berhasil lolos ambang batas parlemen, tetapi dengan perolehan suara yang relatif menurun dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini menjadi tantan-

gan sekaligus peluang untuk melakukan pembenahan internal.

Fenomena kebangkitan partai politik berbasis ideologi atau identitas juga terjadi di berbagai negara. Di sejumlah negara Eropa dan Asia, partai-partai lama mampu bangkit kembali melalui penguatan basis kader dan adaptasi terhadap isu-isu kontemporer, seperti kesejahteraan sosial dan ekonomi kerakyatan.

Yusran menegaskan, perjuangan PPP tidak semata-mata berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat. "Kita tidak sedang berjuang untuk diri sendiri, tetapi untuk masa depan generasi mendatang," katanya.

Ia berharap Muscaber IX PPP dapat menjadi titik awal konsolidasi besar menuju Pemilu 2029, dengan semangat baru dan strategi yang lebih adaptif. Dengan demikian, PPP di Buton Raya diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat posisinya di legislatif. (\*)

## Ruang Udara RI Disebut Dibuka, DPR Tegaskan Kedaulatan Tak Boleh Dilanggar

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-Komisi I DPR RI menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum yang memungkinkan pemberian akses bebas tanpa batas terhadap ruang udara nasional kepada pihak asing, termasuk militer negara lain.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyampaikan hal tersebut merespons laporan sejumlah media asing yang menyebut Indonesia telah menyepakati pemberian akses penuh ruang udara bagi militer Amerika Serikat.

Menurut Sukamta, baik dalam hukum nasional maupun internasional, setiap aktivitas penerbangan asing wajib melalui mekanisme perizinan yang ketat. Proses tersebut mencakup diplomatic clearance dan security clearance sebagai syarat utama.

Ia menegaskan, tidak terdapat ketentuan hukum yang mengizinkan suatu negara memberikan akses bebas sepenuhnya terhadap wilayah udara kepada negara lain.

"Tidak terdapat dasar hukum yang memungkinkan pemberian akses bebas tanpa batas terhadap ruang udara nasional kepada pihak asing," ujarnya, Senin (13/4).

Sukamta menambahkan, posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik menuntut kehati-hatian dalam setiap kebijakan, terutama yang berkaitan dengan akses militer asing.

Menurutnya, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas kawasan dan keseimbangan geopolitik regional.

Ia juga meminta pemerintah memberikan penjelasan yang komprehensif dan berbasis fakta terkait isu yang berkembang di publik.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR

RI, TB Hasanuddin, mengaku pihaknya belum menerima informasi resmi dari pemerintah terkait rencana tersebut.

Hasanuddin mengingatkan, apabila isu tersebut benar, maka pemerintah wajib melakukan konsultasi dengan DPR RI karena menyangkut aspek strategis kedaulatan negara.

Ia menjelaskan bahwa ketentuan mengenai izin masuk wilayah udara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara, khususnya Pasal 40 dan 41.

Dalam aturan tersebut, izin dapat diberikan sepanjang sesuai dengan ketentuan penerbangan serta kerja sama internasional yang berlaku.

Namun demikian, Hasanuddin menilai jika terdapat pemberian blanket clearance, maka pemerintah harus menjelaskan alasan dan pertimbangannya secara terbuka kepada publik.

Selain itu, pemerintah juga harus menetapkan batasan yang jelas terkait jenis pesawat yang diizinkan melintas, termasuk ruang lingkup wilayah udara yang dapat digunakan.

Ia menekankan bahwa seluruh aktivitas pesawat asing harus tetap berada dalam pengawasan TNI Angkatan Udara.

"Perlu diperjelas apakah hanya pesawat logistik atau juga mencakup pesawat militer bersenjata seperti jet tempur," katanya.

Lebih lanjut, Hasanuddin menegaskan bahwa setiap perjanjian yang menyangkut kepentingan strategis negara harus melalui proses ratifikasi di DPR RI.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia selama ini konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak menimbulkan persepsi bahwa Indonesia berpihak pada kekuatan tertentu.

"Jangan sampai Indonesia menjadi arena persaingan kekuatan besar," ujarnya.

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan melalui Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Rico Ricardo Sirait, menyatakan bahwa dokumen yang beredar terkait akses penuh militer AS masih berupa rancangan awal.

Menurutnya, setiap pengaturan yang dibahas tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak aktivitas di ruang udara nasional.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses harus mengikuti peraturan perundang-undangan serta mekanisme kelembagaan yang berlaku.

"Tidak ada ruang bagi implementasi sepihak di luar hukum Indonesia," katanya.

Sebelumnya, media asing The Sunday Guardian melaporkan adanya dokumen pertahanan Amerika Serikat yang mengatur akses lintas udara menyeluruh bagi pesawat militer AS melalui wilayah Indonesia.

Dokumen tersebut disebut dibahas dalam pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington pada Februari lalu.

Dalam laporan itu, disebutkan adanya usulan izin lintas udara untuk berbagai kepentingan, termasuk operasi darurat, tanggap krisis, serta latihan militer bersama.

Namun hingga kini, pemerintah Indonesia belum memberikan pernyataan resmi yang mengonfirmasi kebenaran isi dokumen tersebut. (\*)

## Pemprov Sultra Perkuat Keterbukaan Informasi Demi Iklim Investasi



**Laporan: Mashuri**

SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai strategi utama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor, di tengah dinamika penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang masih berada pada kategori sedang.

Upaya tersebut mengemuka dalam Rapat Sinergitas Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara bersama PPID Utama dan PPID Pembantu se-Sulawesi Tenggara Tahun 2026 yang digelar di Hotel Zahrah Syariah Kendari, Selasa (14/4/2026).

Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik tidak lagi dapat dipandang sebagai kewajiban administratif semata, melainkan harus menjadi fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan modern.

“Transparansi informasi sangat berpengaruh terhadap banyak sektor, terutama investasi. Daerah dengan keterbukaan informasi yang baik akan lebih dipercaya,” kata Asrun Lio.

Menurut dia, capaian IKIP Sulawesi Tenggara tahun 2025 sebesar 65,18 yang berada pada kategori sedang menjadi

indikator perlunya pembenahan serius dalam sistem pelayanan informasi publik.

Penurunan nilai dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa konsistensi dalam penyediaan informasi yang terbuka, akurat, dan mudah diakses masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.

Dalam konteks nasional, keterbukaan informasi publik di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik.

Sejak implementasinya, berbagai daerah berlomba meningkatkan kualitas layanan informasi, seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi dalam era digital dan pemerintahan terbuka (open government).

Secara global, praktik keterbukaan informasi juga menjadi indikator penting dalam penilaian tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), termasuk dalam indeks kemudahan berusaha dan daya tarik investasi suatu negara.

Asrun menambahkan, salah satu

langkah strategis yang ditempuh adalah meningkatkan literasi masyarakat terkait hak atas informasi publik agar masyarakat mampu mengakses dan memanfaatkan informasi secara optimal.

“Pemerintah tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga harus memastikan masyarakat memahaminya dan memanfaatkannya,” ujarnya.

Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi dan sertifikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi fokus utama dalam reformasi layanan informasi.

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga telah didorong untuk mengoptimalkan layanan berbasis digital melalui situs web resmi sebagai sarana penyebaran informasi publik.

Namun demikian, Asrun mengingatkan bahwa keberadaan platform digital harus diiringi dengan pembaruan informasi secara berkala agar tetap relevan dan kredibel.

“Jangan hanya menyediakan ruang informasi, tetapi harus diisi dan terus diperbarui,” tegasnya.

Sementara itu,

Ketua Komisi Informasi Sulawesi Tenggara, Hasmansyah Umar, menegaskan bahwa pihaknya terus berperan aktif dalam mendorong badan publik untuk lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.

“Kami berkomitmen memastikan hak masyarakat atas informasi dapat terpenuhi secara optimal,” ujar Hasman-syah.

Ia menambahkan bahwa Komisi Informasi memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam mengawal implementasi keterbukaan informasi publik agar berjalan efektif dan berkualitas.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Komisi Informasi, serta seluruh badan publik, Sulawesi Tenggara diharapkan mampu meningkatkan kualitas keterbukaan informasi sekaligus memperkuat daya tarik investasi di tingkat nasional maupun global.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan tren internasional yang menempatkan transparansi sebagai faktor utama dalam menciptakan kepercayaan publik, stabilitas ekonomi, dan pertumbuhan investasi berkelanjutan. (\*)

## Gubernur Andi Sumangerukka: Anggaran Terbatas, Tak Boleh Ada Pemborosan



**Laporan: Lisna**

SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya untuk mengarahkan anggaran daerah pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam menekan angka kemiskinan serta memperluas akses layanan pendidikan dan kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sultra di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Senin (30/3/2026).

Apel gabungan tersebut dihadiri oleh Sekda Sultra, Staf Ahli Gubernur, para Asisten Sekda, Kepala OPD, Kepala Biro, pejabat struktural dan fungsional, serta ribuan ASN di lingkungan Pemprov Sultra.

Dalam arahannya, gubernur menekankan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menuntut efisiensi anggaran secara menyeluruh. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menyusun program secara cermat dan tepat sasaran, serta menghindari kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

“Anggaran kita terbatas, sehingga setiap pengeluaran harus diprioritaskan pada kebutuhan nyata masyarakat. Tidak boleh ada pemborosan, termasuk belanja perjalanan dinas yang

tidak mendesak,” tegasnya.

Ia menambahkan, efisiensi anggaran menjadi langkah strategis dalam menghadapi dinamika global yang turut berdampak pada kondisi ekonomi daerah.

Lebih lanjut, gubernur menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan difokuskan pada upaya memutus mata rantai kemiskinan. Saat ini, angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara masih berada di kisaran 10 persen.

“Program pemerintah harus mampu menjawab persoalan kemiskinan secara konkret. Intervensi harus tepat sasaran agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Di sektor infrastruktur, pembangunan tetap dilaksanakan dengan pendekatan yang berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat. Infrastruktur seperti jalan diharapkan mampu membuka akses dan meningkatkan aktivitas ekonomi warga.

“Pembangunan jalan harus memberikan manfaat ekonomi, bukan sekadar proyek fisik,” katanya.

Pada sektor pendidikan, gubernur menegaskan bahwa tidak boleh ada praktik yang membebani masyarakat. Pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk dana BOS, ha-

rus dilakukan secara transparan dan tepat guna.

“Pendidikan adalah kunci masa depan. Tidak boleh ada penyimpangan dalam pelaksanaannya,” tegasnya.

Sementara itu, pada sektor kesehatan, pemerintah daerah menargetkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 100 persen. Saat ini, cakupan tersebut masih berada di angka sekitar 89 persen.

“Seluruh masyarakat harus mendapatkan layanan kesehatan. Ini menjadi prioritas pemerintah daerah,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov Sultra juga tengah menyiapkan penyesuaian sistem kerja ASN sebagai bagian dari efisiensi anggaran, termasuk kemungkinan penerapan sistem kerja dari rumah (work from home). Namun, implementasinya tetap harus menjaga disiplin dan kinerja.

“Apapun sistem kerja yang diterapkan, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” tambahnya.

Gubernur juga mengingatkan seluruh jajaran agar memastikan setiap kebijakan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Program harus berdampak nyata. Itu yang menjadi ukuran keberhasilan kita,” pungkasnya. (\*)

## WFH-WFO Diberlakukan, Pemkab Buton Tengah Perkuat Administrasi Audit



Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP-” Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menata ulang sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) dengan menerapkan skema Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) sebagai langkah strategis menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang tengah berlangsung selama 30 hari.

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menjaga efektivitas kerja birokrasi, tetapi juga memastikan kesiapan administrasi dan keuangan daerah dalam proses audit yang menjadi bagian penting dari akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.

Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Buton Tengah, Armin, menyatakan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) wajib menyiapkan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap dan tepat waktu selama proses pemeriksaan berlangsung.

”Kami harapkan seluruh OPD menyiapkan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap dan tepat waktu,” ujar Armin saat memimpin apel gabungan di pelataran

Kantor Bupati, Senin (6/4/2026).

Dalam rangka mendukung fokus pemeriksaan tersebut, pemerintah daerah juga memutuskan untuk menanggungkan sementara perjalanan dinas ke luar daerah bagi ASN hingga proses audit selesai.

”Selama tim BPK berada di daerah, perjalanan dinas ke luar daerah agar ditanggungkan sementara,” tegasnya.

Sementara itu, penerapan skema WFH-WFO telah diberlakukan sejak awal pekan, khususnya bagi pejabat eselon IV dan staf. Setiap OPD diminta menyusun jadwal kerja bergilir yang terukur dan terkoordinasi.

Armin menjelaskan, pembagian jadwal kerja tersebut wajib dilaporkan kepada Bupati melalui BKPSDM dan selanjutnya menjadi dasar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengatur sistem absensi berbasis aplikasi e-office.

”Setiap OPD wajib menyusun jadwal pembagian kerja dan melaporkannya sebagai dasar pengaturan sistem kerja berbasis digital,” katanya.

Namun demikian, kebijakan kerja fleksibel ini tidak berlaku bagi instansi yang memberikan layanan langsung kepada mas-

asyarakat, terutama yang bersifat darurat seperti pemadam kebakaran dan penanganan bencana.

”Untuk instansi pelayanan seperti Damkar dan kebencanaan, tidak mengenal WFH. Pelayanan harus tetap optimal,” ujar Armin menegaskan.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kebakaran yang meningkat seiring memasuki musim kemarau. Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran diminta memastikan kesiapan peralatan serta personel di lapangan.

Langkah ini menjadi penting mengingat dalam beberapa waktu terakhir terjadi sejumlah insiden kebakaran di berbagai wilayah, yang memerlukan respons cepat dan kesiapsiagaan tinggi dari aparat terkait.

Secara historis, penerapan pola kerja fleksibel seperti WFH-WFO mulai dikenal luas sejak pandemi COVID-19 pada 2020, ketika banyak negara, termasuk Indonesia, mengadopsi sistem kerja jarak jauh untuk menjaga produktivitas sekaligus menekan penyebaran virus.

Di tingkat nasional, kebijakan serupa pernah diterapkan melalui

berbagai surat edaran pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri, yang mendorong digitalisasi birokrasi dan fleksibilitas kerja ASN sebagai bagian dari reformasi administrasi publik.

Secara global, tren kerja fleksibel juga terus berkembang, terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang mengintegrasikan sistem kerja hybrid sebagai model baru dalam manajemen sumber daya manusia modern.

Dalam konteks pengawasan keuangan, pemeriksaan oleh BPK RI merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan menilai kepatuhan, efektivitas, serta transparansi pengelolaan anggaran daerah. Hasil audit ini nantinya akan menjadi dasar penilaian opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan kombinasi kebijakan kerja fleksibel, pembatasan mobilitas, serta peningkatan kesiapan dokumen, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah optimistis dapat menjalani proses audit secara optimal sekaligus menjaga pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.\*

## Bupati Buton Alvin Akawijaya Dorong RKPD 2027 Berbasis Aspal dan Investasi Produktif



BUTON, BP-Pemerintah Kabupaten Buton menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang secara resmi dibuka oleh Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, di Aula Kantor Bupati Buton, Kompleks Perkantoran Takawa, Kamis (9/4/2026).

Dalam forum tersebut, Bupati Alvin menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang adaptif, terukur, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

”Saya ingin Buton yang lebih baik. Mari kita bersama-sama mengawal visi ini meskipun di tengah keterbatasan anggaran,” ujar Alvin dalam pidato penutupnya.

Salah satu fokus utama yang mengemuka dalam Musrenbang adalah peluang strategis pemanfaatan Aspal Buton sebagai bagian dari kebijakan nasional di sektor infrastruktur.

Mengacu pada arahan Presiden Republik Indonesia, pemerintah pusat mendorong penggunaan minimal 30 persen material pembangunan jalan nasional berasal dari Aspal Buton.

”Di tengah situasi global saat ini, Buton mendapat ”rezeki” . Presiden telah memberi atensi agar Aspal Buton kembali hidup dan dimanfaatkan secara luas,” kata Alvin.

Kebijakan tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi Kabupaten Buton untuk meningkatkan peran ekonomi daerah sekaligus memperkuat posisi dalam rantai pasok nasional sektor konstruksi.

Secara historis, Aspal Buton atau asbuton telah dikenal sejak masa kolonial Belanda pada awal abad ke-

20 sebagai salah satu cadangan aspal alam terbesar di dunia. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, pemanfaatannya cenderung menurun akibat dominasi aspal impor berbasis minyak bumi.

Di tingkat global, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Kanada telah lebih dulu mengembangkan industri aspal berbasis sumber daya lokal sebagai strategi ketahanan infrastruktur dan efisiensi biaya jangka panjang.

Selain isu aspal, Musrenbang juga menyoroti tantangan mendasar pembangunan daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, hingga pengangguran terbuka.

Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN/Bappenas, Ika Retna Wulandary, menyampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2027 akan berfokus pada peningkatan produktivitas, investasi, dan penguatan sektor industri.

”Pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan mencapai 6,3 hingga 7,5 persen, dengan penekanan pada kualitas sumber daya manusia dan inovasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, pendekatan pembangunan tersebut dikenal dengan konsep ”trisula pembangunan” yang mengedepankan intervensi kewilayahan secara tepat sasaran.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Wisnu Hidayat, menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan wajib dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, penyusunan RKPD harus memenuhi empat prinsip utama, yakni terintegrasi dalam sistem perencanaan, melibatkan pemangku kepentingan, selaras dengan tata ruang, serta berbasis pada potensi dan

dinamika daerah. ”Pembangunan daerah harus bermuara pada peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,” tegasnya.

Dari perspektif daerah, perwakilan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, Nur Fitrah Edyansyah, mengingatkan pentingnya perencanaan berbasis data di tengah keterbatasan fiskal.

”Perencanaan harus fokus, realistis, dan memiliki daya ungkit tinggi agar benar-benar berdampak bagi masyarakat,” katanya.

Sejumlah program prioritas daerah turut disoroti dalam Musrenbang tersebut, di antaranya revitalisasi Pasar Kaloko pascakebakaran sebagai upaya pemulihan ekonomi lokal.

Selain itu, pemeliharaan infrastruktur strategis seperti Jalan 25 Buton serta peningkatan kualitas layanan publik, termasuk fasilitas kesehatan di RSUD Kabupaten Buton, juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Di sektor layanan dasar, kinerja PDAM Buton dilaporkan menunjukkan tren positif dengan capaian penilaian baik di tingkat provinsi, mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari peluang strategis tersebut, delegasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dijadwalkan melakukan kunjungan ke Kabupaten Buton pada 13 April 2026 untuk meninjau langsung potensi pengembangan Aspal Buton.

Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Buton berharap dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang tidak hanya selaras dengan agenda nasional, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat secara berkelanjutan.\*

## Puluhan Siswa Baubau Ikuti Program Tagana Masuk Sekolah tentang Bencana



### Laporan: Firman

BAUBAU, BP-Upaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana sejak usia dini terus digencarkan oleh Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Baubau melalui program Tagana Masuk Sekolah (TMS) yang dilaksanakan di sejumlah sekolah menengah.

Kegiatan tersebut menasar siswa dan tenaga pendidik di SMPN 18 dan SMAN 5 Baubau. Puluhan peserta mendapatkan edukasi praktis terkait langkah-langkah melindungi diri saat terjadi bencana.

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Baubau, Dra Hj Amalia, M.Si, mengungkapkan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam membangun budaya sadar bencana di lingkungan pendidikan.

Menurutnya, program Tagana Masuk Sekolah merupakan hasil sinergi antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Indonesia dalam mem-

perkuat mitigasi bencana di satuan pendidikan.

Program tersebut juga mengacu pada surat edaran bersama Menteri Pendidikan Nomor 4 Tahun 2019 dan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang mitigasi kebencanaan di lingkungan sekolah.

Dalam pelaksanaannya, siswa diberikan pemahaman mengenai berbagai jenis bencana serta cara menghadapi situasi darurat secara tepat dan cepat.

Selain itu, peserta juga dibekali strategi kesiapsiagaan, termasuk pengorganisasian penanggulangan bencana di lingkungan sekolah serta penentuan tanda bahaya yang mudah dipahami oleh seluruh warga sekolah.

Materi lainnya meliputi penentuan jalur evakuasi dan titik kumpul, mekanisme penyampaian informasi darurat, hingga simulasi kebencanaan yang dilakukan secara berkala.

Amalia menegaskan

kan bahwa tujuan utama program ini adalah membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan menghadapi bencana sejak dini.

“Melalui program ini, diharapkan siswa memiliki kecakapan dalam menghadapi situasi darurat serta mampu melindungi diri sendiri maupun orang lain,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam kegiatan tersebut anggota Tagana Kota Baubau juga memberikan pelatihan mengenai manajemen penanggulangan bencana serta pembentukan tim siaga bencana di sekolah.

Antusiasme peserta terlihat tinggi selama kegiatan berlangsung. Para siswa menunjukkan minat besar terhadap materi yang disampaikan, terutama karena topik tersebut jarang diperoleh dalam pembelajaran formal.

Amalia berharap program Tagana Masuk Sekolah dapat memberikan perlindungan bagi siswa, guru, dan tenaga

kependidikan dari risiko bencana.

Selain itu, program ini juga diharapkan mampu meminimalkan gangguan terhadap proses belajar mengajar saat terjadi bencana.

Lingkungan sekolah pun diharapkan menjadi lebih aman dan siap menghadapi berbagai kemungkinan bencana, sekaligus berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat dalam kondisi darurat.

Sementara itu, pihak SMAN 5 Baubau menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan Tagana atas pelaksanaan program tersebut.

Perwakilan sekolah menilai kegiatan ini sangat bermanfaat karena memberikan pengetahuan penting mengenai kewaspadaan bencana serta langkah-langkah penyelamatan diri.

Dengan adanya program ini, diharapkan kesadaran dan kesiapan generasi muda dalam menghadapi bencana dapat terus meningkat di masa mendatang. (\*)

## RSUP Fatmawati Gandeng SNUH, Transplantasi Hati Indonesia Melesat



### Peliput: Andina L

JAKARTA, BP-Pemerintah Indonesia terus mendorong percepatan pengembangan layanan transplantasi hati melalui kerja sama internasional. Salah satu langkah konkret ditunjukkan melalui kolaborasi antara RSUP Fatmawati dan Seoul National University Hospital (SNUH) yang berhasil melaksanakan transplantasi hati ketiga pada 9 April 2026.

Keberhasilan tersebut menjadi indikator meningkatnya kapasitas tenaga medis nasional dalam menangani prosedur kompleks yang selama ini masih terbatas di Indonesia. Transplantasi hati dikenal sebagai salah satu tindakan medis dengan tingkat kesulitan tinggi karena melibatkan koordinasi tim multidisiplin serta teknologi canggih.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa kolaborasi lintas negara menjadi kunci dalam mempercepat kemandirian layanan kesehatan nasional.

“Kolaborasi dengan mitra internasional memungkinkan terjadinya transfer knowledge dan skill, sehingga ke depan Indonesia dapat mandiri dalam layanan transplantasi organ,” ujar Dante dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Ia menjelaskan, pengembangan layanan transplantasi tidak hanya bergantung pada kemampuan dokter, tetapi juga kesiapan sistem

kesehatan secara menyeluruh, mulai dari regulasi, fasilitas, hingga dukungan pembiayaan.

Dalam kerja sama ini, tim medis Indonesia mendapatkan pendampingan langsung dari para ahli SNUH yang telah berpengalaman lebih dari tiga dekade dalam bidang transplantasi hati. Pendampingan tersebut mencakup pelatihan teknis, manajemen pasien, hingga evaluasi pascaoperasi.

Pakar transplantasi hati SNUH, Kwang-Woong Lee, menilai perkembangan tim di RSUP Fatmawati sangat signifikan dalam waktu relatif singkat.

“Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dan lebih dari 2.000 transplantasi hati, saya melihat progres yang sangat baik di sini. Tim menunjukkan peningkatan kapasitas yang signifikan,” ungkapnya.

Menurutnya, pendekatan yang dilakukan dalam program ini telah berjalan secara sistematis dan terstruktur, sehingga layak untuk ditingkatkan ke tahap yang lebih maju.

“Program ini berjalan dengan baik, mulai dari pelatihan hingga implementasi kasus. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan ke tahap yang lebih maju,” tambah Kwang-Woong Lee.

Secara historis, layanan transplantasi organ di Indonesia mulai berkembang sejak awal 2000-an, namun masih menghadapi

berbagai kendala seperti keterbatasan donor, infrastruktur, serta tenaga ahli. Hingga kini, jumlah rumah sakit yang mampu melakukan transplantasi hati masih sangat terbatas.

Sementara itu, di tingkat global, transplantasi hati pertama kali berhasil dilakukan pada 1967 oleh Thomas Starzl di Amerika Serikat. Sejak saat itu, teknologi dan teknik operasi terus berkembang pesat, menjadikan transplantasi hati sebagai prosedur yang semakin aman dengan tingkat keberhasilan tinggi.

Korea Selatan sendiri dikenal sebagai salah satu negara dengan kemajuan pesat dalam bidang transplantasi organ, dengan sistem yang terintegrasi dan volume tindakan yang tinggi setiap tahunnya.

Melalui kolaborasi ini, Indonesia diharapkan dapat mengejar ketertinggalan sekaligus memperluas akses layanan transplantasi hati ke berbagai daerah. Pemerintah juga menargetkan terbentuknya pusat-pusat transplantasi baru di sejumlah rumah sakit rujukan nasional.

Selain itu, kerja sama internasional seperti ini dinilai penting untuk meningkatkan standar keselamatan pasien, sekaligus memastikan praktik medis di Indonesia selaras dengan perkembangan global.

Ke depan, sinergi antara tenaga medis dalam negeri dan mitra internasional diharapkan terus berlanjut guna memperkuat sistem kesehatan nasional secara berkelanjutan. (\*)

PT FAREN GRAFIKA



KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruokan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA  
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi  
Redpel: Prasetyo  
Korlip: Firman  
Redaktur: Kasrun, Rahim  
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Ririn  
Pracetak: Aditya  
Cetak: Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA  
Komisaris: Erna Agule  
Direktur Utama: Andina Latief  
Manager Keuangan: Nabila DAA  
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin  
Kepala Sirkulasi: Robi  
Administrasi: Salvana

Kepala Biro Wakatobi: Risman  
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun  
Kepala Biro Buton: La Harman  
Kepala Biro Buton Selatan: Firman  
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin  
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin  
Agen Buton Selatan: Firman  
Agen Buton: Samrihan  
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,

Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01  
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara  
Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com  
Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01  
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

## Dugaan Abaikan Laporan Warga, Polisi Jaksel Diperiksa Propam



Ilustrasi. Bidang Propam Polda Metro Jaya selidiki dugaan anggota Polsek Pasar Minggu yang abaikan laporan orang hilang.

### Laporan: Amran

JAKARTA, BP-Seorang lansia bernama Warisem yang sempat dilaporkan hilang kini telah kembali ke keluarganya dalam kondisi sehat. Namun, peristiwa yang sempat viral di media sosial itu memicu penyelidikan internal oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya terkait dugaan kelalaian anggota Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam menangani laporan masyarakat.

Kapolsek Pasar Minggu, Kopol Anggiat Sinambela, menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut sekaligus memastikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kepolisian di tingkat sektor.

"Kami menyampaikan permohonan maaf dan akan lebih memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan kehadiran dan bantuan polisi," ujar Anggiat.

Kasus ini bermula ketika warga menemukan Warisem dalam kondisi kebingungan dan kemudi-

an membawanya ke Polsek Pasar Minggu. Namun, dalam perkembangan berikutnya, lansia tersebut diduga dilepas oleh anggota kepolisian sebelum dijemput oleh keluarganya.

Situasi tersebut memicu kritik publik, terutama setelah informasi itu menyebar luas di media sosial dan memunculkan pertanyaan mengenai standar operasional prosedur dalam menangani orang hilang, khususnya kelompok rentan seperti lansia.

Menanggapi hal itu, Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Radjo Harahap, menegaskan pihaknya telah memulai proses pemeriksaan terhadap anggota yang menerima laporan tersebut.

"Kasus ini kami monitor dan sedang dalam proses pemeriksaan terhadap anggota Polsek Pasar Minggu yang menerima informasi dari masyarakat," kata Radjo, Rabu (15/4).

Ia menjelaskan, langkah tersebut diambil untuk memastikan apakah tindakan anggota di lapangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelayanan kepoli-

sian.

"Anggota yang bersangkutan sudah kami hubungi dan akan dimintai keterangan untuk mendalami kronologi secara utuh," tambahnya.

Meski demikian, Radjo belum mengungkapkan identitas maupun jumlah anggota yang diperiksa dalam kasus tersebut.

Dalam perspektif yang lebih luas, penanganan kasus orang hilang di Indonesia sebenarnya telah memiliki pedoman yang cukup jelas. Kepolisian Republik Indonesia melalui berbagai regulasi internal mengatur bahwa setiap laporan orang hilang harus segera ditindaklanjuti tanpa menunggu waktu tertentu.

Secara historis, isu penanganan orang hilang juga menjadi perhatian global. Organisasi seperti Interpol bahkan memiliki sistem basis data orang hilang lintas negara guna mempercepat proses pencarian dan identifikasi korban.

Di Indonesia sendiri, sejumlah kasus orang hilang yang mendapat sorotan publik<sup>1</sup> baik karena faktor kelalaian maupun keterlambatan penanganan<sup>2</sup> kerap men-

jadi momentum evaluasi bagi institusi penegak hukum untuk memperbaiki standar pelayanan.

Pengamat kepolisian menilai bahwa kasus seperti ini menunjukkan pentingnya peningkatan sensitivitas aparat terhadap kelompok rentan, termasuk lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan laporan masyarakat juga dinilai menjadi faktor kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Peristiwa yang melibatkan Warisem ini pun menjadi pengingat bahwa profesionalitas aparat tidak hanya diukur dari penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan memberikan perlindungan dan pelayanan yang cepat serta tepat kepada masyarakat.

Dengan adanya pemeriksaan dari Propam, diharapkan hasilnya dapat menjadi dasar perbaikan sistemik di internal kepolisian, sekaligus mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. (\*)

## Baleg DPR Undang BPK, BPKP dan MA Bahas Penetapan Kerugian Negara



Baleg DPR akan memanggil BPK, BPKP dan MA terkait dengan pengawasan dan evaluasi UU Tindak Pidana Korupsi menyangkut dengan penilaian kerugian negara.

### Laporan: Hadi

JAKARTA, BP-Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Badan Legislasi DPR) akan melakukan pemantauan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan penetapan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Langkah tersebut diambil menyusul terbitnya putusan Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang menegaskan bahwa hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang menetapkan kerugian negara.

Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat kerja guna menindaklanjuti putusan tersebut dalam kerangka pengawasan dan evaluasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Menurutnya, rapat kerja tersebut akan melibatkan sejumlah lembaga penting, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Mahkamah Agung, serta organisasi profesi seperti Ikatan

Akuntan Indonesia.

"Kami akan mengundang seluruh pihak terkait untuk membahas secara komprehensif pelaksanaan dan implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini," ujar Bob dalam keterangannya, Selasa (14/4).

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga meminta DPR untuk melakukan perbaikan terhadap norma atau frasa "kerugian negara" agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Baleg DPR, Martin Mahnurung, menegaskan pentingnya kejelasan definisi dalam regulasi guna menjamin kepastian hukum.

Ia menjelaskan bahwa perbedaan penafsiran mengenai kerugian negara selama ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan bahkan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi.

"Penerapan yang tidak seragam terhadap nor-

ma atau frasa kerugian negara dapat berdampak serius terhadap keadilan dan kepastian hukum," kata Martin.

Oleh karena itu, Baleg DPR berupaya memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama terkait implementasi norma tersebut pasca putusan MK.

Selain itu, proses pemantauan dan peninjauan ini juga akan membuka ruang partisipasi publik, termasuk masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap isu tersebut.

Baleg DPR berharap, melalui langkah ini, akan tercipta keselarasan dalam penegakan hukum serta penguatan sistem hukum nasional, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen DPR dalam memperbaiki kualitas regulasi agar lebih jelas, tegas, dan tidak menimbulkan perbedaan interpretasi di lapangan. (\*)

## Walikota Baubau H Yusran Fahim Dorong Aksi Nyata, Tak Ada Alasan Proyek Jalan Rau-Pos 3 Segera Tender



Walikota Baubau HYF pimpin apel gabungan di Pelataran Kantor Walikota Baubau

### Laporan: Firman

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur dengan mendorong percepatan serapan anggaran pada triwulan kedua tahun 2026. Salah satu proyek prioritas yang segera dijalankan adalah pembangunan jalan di kawasan Rau dan Pos Tiga yang kini telah memasuki tahap pelelangan.

Wali Kota Baubau, H. Yusran Fahim, SE, menegaskan bahwa percepatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur dasar.

“Serapan anggaran kita masih rendah. Saya minta seluruh kepala dinas berhenti mencari alasan dan segera melakukan aksi nyata,” ujar Yusran dalam apel ASN di halaman Kantor Wali Kota Baubau, Palagimata, Senin (13/04/2026).

Dorongan percepatan pembangunan tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang sejak beberapa tahun terakhir

akhir menekankan pentingnya efektivitas belanja daerah. Secara nasional, isu rendahnya serapan anggaran kerap menjadi sorotan karena berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam konteks historis, percepatan pembangunan infrastruktur telah menjadi agenda utama Indonesia sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang menitikberatkan konektivitas wilayah untuk mendorong pemerataan ekonomi. Bahkan secara global, Bank Dunia mencatat bahwa investasi infrastruktur menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan daya saing daerah dan menekan kesenjangan.

Di tingkat lokal, Pemkot Baubau memastikan proyek pembangunan jalan di Rau dan Pos Tiga tidak mengalami penundaan. Proses administrasi yang tengah berjalan disebut sebagai tahapan krusial sebelum pelaksanaan fisik dimulai.

“Pembangunan jalan di Pos Tiga dalam waktu dekat akan terlaksana. Saat ini sedang dalam proses pelelangan,” kata Yusran.

Ia menekankan bahwa pemerintah

tidak pernah mengabaikan kebutuhan masyarakat, namun setiap proyek wajib mengikuti prosedur administrasi yang berlaku guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Selain fokus pada infrastruktur, Pemkot Baubau juga menaruh perhatian pada penataan ruang kota yang dinilai mulai tidak tertib akibat maraknya bangunan liar.

Wali Kota meminta seluruh OPD, camat, hingga lurah untuk meningkatkan pengawasan dan bertindak tegas terhadap pelanggaran tata ruang.

“Kami ingin menjalankan aturan secara maksimal, tetapi dibutuhkan dukungan informasi dari masyarakat di tingkat bawah,” ujarnya.

Menurut dia, peran RT dan RW sangat penting dalam memberikan laporan dini terkait pelanggaran di lingkungan masing-masing agar penertiban dapat dilakukan secara efektif.

Di sisi lain, pemerintah kota juga mengambil langkah adaptif menghadapi dinamika ekonomi nasional dengan menerapkan sistem Work From Home (WFH) bagi ASN

dalam periode tertentu.

Kebijakan ini, menurut Yusran, merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran di tengah potensi tekanan ekonomi, termasuk kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dapat memengaruhi stabilitas fiskal.

“Ini adalah upaya kita bersama untuk mengantisipasi kondisi keuangan negara yang belum stabil,” katanya.

Ia menegaskan bahwa penerapan WFH tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik. Seluruh ASN tetap diwajibkan menjaga kinerja dan melaporkan aktivitasnya kepada instansi pengawas.

“Meski bekerja dari rumah, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan maksimal,” tegasnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkot Baubau berharap percepatan pembangunan dan efisiensi anggaran dapat berjalan beriringan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (\*)

## Pemkot PN Baubau Perkuat Layanan Hukum Lewat Aplikasi Kalpena Digital untuk Tekan Pungli



Pemerintah Kota Baubau bersama Pengadilan Negeri Baubau resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait pengembangan dan pemanfaatan aplikasi Kalpena Baubau (Kalkulator Panjar Perkara), Senin (14/04/2026).

### Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau bersama Pengadilan Negeri Baubau resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait pengembangan dan pemanfaatan aplikasi Kalpena Baubau (Kalkulator Panjar Perkara), Senin (14/04/2026). Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam menghadirkan transparansi biaya perkara sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum berbasis digital.

Penandatanganan yang berlangsung di ruang kerja Wali Kota Baubau itu melibatkan langsung Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE dan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Amin Imanuel Bureni. Kesepakatan ini menandai penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sekretaris Daerah Kota Baubau, La Ode Darus Salam, menjelaskan bahwa kehadiran aplikasi Kalpena menjadi solusi atas persoalan klasik yang selama ini dihadapi masyarakat, yakni ketidakjelasan biaya perkara.

“Selama ini masyarakat sering tidak tahu rincian biaya, sehingga mudah dimanfaatkan oleh calo yang menetapkan tarif tinggi. Dengan aplikasi ini, semua menjadi terbuka dan bisa diakses sendiri,” ujarnya.

Ia menambahkan, digitalisasi layanan hukum ini diharapkan mampu memutus mata rantai pungutan liar yang kerap terjadi akibat minimnya informasi yang diterima masyarakat.

Aplikasi Kalpena Baubau sendiri dirancang untuk memberikan estimasi biaya perkara secara cepat

dan akurat, bahkan sebelum proses hukum dimulai. Dengan demikian, masyarakat dapat merencanakan langkah hukum secara lebih matang tanpa harus bergantung pada pihak ketiga.

Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, khususnya dalam menghadapi persoalan hukum.

“Pemerintah daerah adalah wakil rakyat. Kita ingin memastikan tidak ada lagi pembodohan terhadap masyarakat, termasuk dalam hal biaya perkara,” tegasnya.

Menurut Yusran, selama ini masih banyak warga yang tidak memahami hak-haknya saat berhadapan dengan hukum, sehingga berpotensi menjadi korban praktik percaloan maupun informasi yang menyesatkan.

“Dengan kerja sama ini, pengadilan akan memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat mengenai prosedur dan biaya, sehingga tidak ada ruang bagi pihak yang berniat tidak baik,” lanjutnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau, H. Andi Hamzah Machmud, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung operasional aplikasi Kalpena dari sisi infrastruktur teknologi.

“Kami memastikan keamanan data serta stabilitas jaringan agar aplikasi ini dapat diakses secara lancar oleh masyarakat,” katanya.

Secara substansi, nota kesepahaman ini mencakup sejumlah tujuan utama, yakni memberikan kemudahan akses informasi biaya perkara, meningkatkan pelayanan berbasis digital, mendukung reformasi bi-

rokrasi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Langkah ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional yang sejak awal 2000-an terus didorong melalui penerapan e-government di berbagai sektor pelayanan publik, termasuk sektor peradilan.

Dalam konteks nasional, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah lebih dulu mengembangkan sistem peradilan elektronik (e-court) sejak 2018 sebagai bagian dari modernisasi layanan hukum. Aplikasi Kalpena Baubau dapat dilihat sebagai penguatan di tingkat daerah untuk memperluas implementasi transparansi tersebut.

Secara internasional, pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan juga telah menjadi tren global. Negara-negara seperti Singapura dan Estonia dikenal sebagai pelopor dalam digitalisasi layanan hukum, yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi perkara secara daring dengan mudah dan cepat.

Kehadiran Kalpena Baubau menunjukkan bahwa transformasi digital di sektor hukum tidak hanya terjadi di tingkat pusat atau negara maju, tetapi juga mulai diadopsi oleh pemerintah daerah di Indonesia.

Dengan implementasi aplikasi ini, Pemkot Baubau dan Pengadilan Negeri Baubau berharap dapat menciptakan sistem pelayanan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif.

Kerja sama ini sekaligus menjadi tonggak penting dalam mendorong keadilan yang lebih terbuka bagi masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan di Kota Baubau. (\*)